



Spanduk larangan berjalan terpasang di beberapa ruas jalan di Kotabaru, Jumat (21/2).

KETERTIBAN UMUM

Puluhan Lapak Kopi di Kotabaru Ditertibkan

GONDOKUSUMAN- Pemerintah Kemantren Gondokusuman menutup puluhan kedai kopi jalanan di kawasan Kotabaru. Penertiban ini sebagai tindak lanjut dari adanya aduan warga sekitar yang mengeluhkan dampak negatif menjamurnya kopi jalanan ini.

Lugas Subarkah & Afif Annissa Karim
redaksi@harianjogja.com

Kemunculan kopi jalanan di Kotabaru baru mulai awal 2024. Antusiasme tinggi dari anak muda terhadap kopi jalanan waktu itu membuat jumlahnya terus bertambah. Dari catatan Kemantren Gondokusuman, hingga akhir 2024 sudah ada 40 pelaku usaha kopi jalanan yang tersebar di beberapa ruas jalan di Kotabaru.

Saat ini sudah tidak ada lagi kopi jalanan yang beroperasi. Spanduk pelarangan berjalan di badan jalan dari Satpol PP Kota Jogja dipasang di beberapa titik. Mantri Pamong Praja Gondokusuman, Guritno, menjelaskan semua kedai kopi jalanan di kawasan Kotabaru tidak berizin. Selain itu, mereka juga

menempati badan jalan sebagai tempat berjalan.

"Kami tidak melarang orang berusaha, tetapi ada aturan berusaha yang harus ditaati. Pelaku usaha kopi jalanan melanggar Perda No. 7/2024 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, karena badan milik jalan digunakan untuk berjalan," ujarnya, Jumat (21/2).

Warga di Kotabaru juga mengeluhkan keberadaan kedai kopi jalanan yang dinilai membuat kegaduhan, bahkan ada yang berjualan hingga pukul 03.00 WIB," katanya.

Merujuk Rencana Detail Tata Ruang Kota Jogja, Kotabaru merupakan kawasan permukiman eksklusif yang ditopang untuk kawasan peribadatan seperti Masjid Syuhada, Gereja HKBP, Gereja Katedral Kotabaru. "Beberapa pihak seperti gereja dan Masjid Syuhada juga membuat surat keberatan. Mereka mengeluhkan kegaduhan dan sering ditemukannya botol miras di sekitar lokasi kopi jalanan," kata dia.

Untuk mendukung keberadaan

UMKM di kawasan ini, Pemkot Jogja segera menata Kotabaru. Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, mengatakan penataan yang dilakukan tidak bertujuan mematikan UMKM. "Bukan masalah suka maupun tidak suka dengan UMKM-nya, tapi masalah tata kelola lokasinya. Jangan salah kaprah, yang dipermasalahkan tempatnya. Apakah rencana tata ruang wilayah (RTRW) nya sesuai," ujar Wawan saat ditemui, Jumat.

Rencana penataan kawasan Kotabaru, menurut Wawan, masih dibahas lebih lanjut. Terlebih, saat ini Pemkot baru fokus menyelesaikan masalah sampah.

Wawan menyebut jajarannya bakal menggandeng instansi terkait dalam penataan ini. Sementara, Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Aradat, mengatakan selain menertibkan PKL, jajarannya juga menertibkan sejumlah titik parkir tak berizin. "Parkir wajib menyesuaikan ketentuan Dinas Perhubungan, yang memiliki lahan untuk usaha parkir juga harus bersedia mengurus izin," tuturnya.

- Spanduk pelarangan berjalan di badan jalan dari Satpol PP Kota Jogja dipasang di beberapa titik.
- Wawan mengatakan penataan yang dilakukan tidak bertujuan mematikan UMKM.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005